

PERSEPSI GURU TERHADAP PENILAIAN AKREDITASI OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH DI MADRASAH IBTIDAIYAH

Abdul Kohar^{1*}, Uyun Wahyuri², Dadun Abdul Kohar³, Dadin Arif Maftuh⁴

^{1,2,3,4}Institut KH. Ahmad Sanusi Sukabumi, Jawa Barat Indonesia

*Corresponding E-mail: akohar0810@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.70287/epistemic.v4i3.472>

Diterima: 07-07-2025 | Direvisi: 07-08-2025 | Diterbitkan: 30-09-2025

Abstract:

Accreditation assessment by the National Accreditation Agency for Schools/Madrasahs (BAN-S/M) is an important instrument in improving the quality of education. However, its implementation often faces challenges, such as complex preparations and limited resources. This study uses a qualitative approach with a case study design to explore teachers' perceptions of the implementation of accreditation at Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin Kp. Cipeundeuy. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The results show differences in perceptions among teachers. Some teachers view accreditation as a motivation to improve the quality of learning and professionalism, while others consider the process burdensome due to administrative burdens, lack of incentives, and uneven distribution of resources. The madrasah received a C accreditation, which had an impact on its attractiveness to prospective students, even though student discipline remained high. These findings emphasize the need for more equitable and contextual accreditation policies, accompanied by government support to strengthen teacher welfare and improve the quality of education in madrasahs. Accreditation designed with the actual conditions of schools in mind can be a means of professional development for teachers while also increasing public trust.

Keywords: accreditation, educational quality, Madrasah Ibtidaiyah, teacher perceptions

Abstrak:

Penilaian akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) merupakan instrumen penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Namun, implementasinya sering menghadapi tantangan, seperti persiapan yang kompleks dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi persepsi guru terhadap pelaksanaan akreditasi di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin Kp. Cipeundeuy. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi di kalangan guru. Sebagian guru memandang akreditasi sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme, sementara sebagian lain menilai proses ini memberatkan karena beban administrasi, minimnya insentif, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Madrasah memperoleh akreditasi C, yang berdampak pada penurunan daya tarik bagi calon siswa, meskipun kedisiplinan siswa tetap terjaga. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan akreditasi yang lebih adil dan kontekstual, disertai dukungan pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan guru dan meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Akreditasi yang dirancang dengan mempertimbangkan kondisi nyata sekolah dapat menjadi sarana pengembangan profesional guru sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Akreditasi, Kualitas Pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah, Persepsi Guru

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Di era globalisasi, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai modal utama dalam membentuk daya saing bangsa (Zahwa dkk., 2025). Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menetapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan untuk menjamin kualitas layanan pendidikan di semua jenjang sekolah dan madrasah (Sulistiyanto dkk., 2023). Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur pencapaian standar tersebut adalah akreditasi (Ramdani dkk., 2018). Melalui akreditasi, kualitas lembaga pendidikan dapat dinilai secara objektif berdasarkan indikator tertentu, sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, pemerintah, maupun lembaga itu sendiri untuk melakukan evaluasi dan perbaikan (Dewi & Ali, 2020).

Akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang memiliki kewenangan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan mutu suatu lembaga pendidikan. Hasil akreditasi yang berupa peringkat (unggul, baik sekali atau baik) tidak hanya berfungsi sebagai label kualitas, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka. Akreditasi juga menjadi salah satu syarat administratif dalam proses kerja sama sekolah dengan pihak eksternal, serta berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan dan dukungan pemerintah (Asopwan, 2019).

Madrasah memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan Indonesia karena berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai institusi yang menanamkan nilai-nilai keagamaan (Isnaini, 2013). Menurut data Kementerian Agama tahun 2021, lebih dari 80% madrasah berada di bawah pengelolaan masyarakat atau yayasan, yang berarti bahwa dukungan finansial dan sumber daya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat sekitar (Yunadi, 2025). Kondisi ini berbeda dengan sekolah negeri yang mendapatkan dukungan lebih besar dari pemerintah.

Madrasah Ibtidaiyah, sebagai jenjang pendidikan dasar berbasis Islam, memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi standar akreditasi (Jannah & Khairunnisa, 2025). Standar yang ditetapkan oleh BAN-S/M mencakup delapan aspek, antara lain kurikulum, tenaga pendidik, manajemen sekolah, pembiayaan, sarana prasarana, dan hasil belajar siswa. Bagi sebagian madrasah, pemenuhan standar ini bukanlah hal mudah karena keterbatasan dana, minimnya pelatihan bagi guru, serta kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran (Darathea, 2025). Oleh sebab itu, proses akreditasi sering kali menimbulkan dinamika yang kompleks, baik di tingkat manajemen maupun di kalangan guru.

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa implementasi akreditasi sering

kali menghadapi berbagai hambatan. Misalnya, studi oleh Yadnya (2020) menunjukkan bahwa sekolah dan madrasah membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan oleh BAN-S/M. Hal ini mengakibatkan guru harus mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan administratif, sehingga waktu untuk mempersiapkan pembelajaran berkurang. Guru yang seharusnya fokus pada pengembangan pembelajaran justru terbebani dengan pengumpulan bukti fisik, penyusunan laporan, dan pengisian instrumen akreditasi.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala serius. Sekolah atau madrasah yang berada di daerah dengan dukungan finansial minim sering kali kesulitan menyediakan sarana prasarana sesuai standar, seperti laboratorium, perpustakaan, atau fasilitas teknologi informasi (Sari & Saputra, 2024). Ketidakmerataan distribusi bantuan pemerintah memperparah kesenjangan kualitas antar sekolah, sehingga sekolah di wilayah perkotaan umumnya lebih mudah memperoleh akreditasi dengan nilai tinggi dibandingkan sekolah di pedesaan (Rahman & Asha, 2024).

Dampak dari akreditasi juga tidak selalu positif. Meskipun secara ideal akreditasi bertujuan mendorong perbaikan mutu, dalam praktiknya sering muncul persepsi negatif dari kalangan guru (Salsabilla dkk., 2024). Sebagian guru menilai akreditasi hanya sebagai beban administratif tanpa memberikan dampak signifikan pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bahkan, peringkat akreditasi rendah dapat memengaruhi citra sekolah di mata masyarakat dan berdampak pada menurunnya jumlah pendaftar, sehingga menambah tekanan bagi guru dan manajemen sekolah.

Guru memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka bukan hanya pelaksana kurikulum, tetapi juga agen perubahan yang menentukan keberhasilan implementasi standar mutu pendidikan. Oleh karena itu, persepsi guru terhadap akreditasi sangat penting untuk dipahami. Persepsi yang positif dapat mendorong guru untuk menjadikan akreditasi sebagai motivasi perbaikan, sementara persepsi negatif dapat menimbulkan resistensi dan menurunkan motivasi kerja (Hakim, 2024).

Studi mengenai persepsi guru terhadap akreditasi masih relatif terbatas, terutama di lingkungan madrasah ibtidaiyah. Padahal, guru di madrasah sering kali menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan sekolah umum, misalnya terkait kesejahteraan yang rendah, beban kerja ganda, serta minimnya akses terhadap pelatihan profesional (Hendrik Dewantara, 2024). Hal ini berpotensi memengaruhi cara pandang mereka terhadap program akreditasi yang diterapkan pemerintah.

Sebagian besar penelitian terdahulu tentang akreditasi lebih banyak

menyoroti aspek manajerial dan administratif, seperti efektivitas instrumen penilaian, prosedur pelaksanaan, dan peran kepala sekolah dalam memimpin proses akreditasi (Zain, 2022). Relatif sedikit penelitian yang secara khusus menggali bagaimana persepsi guru terhadap proses akreditasi, khususnya di madrasah ibtidaiyah yang menghadapi keterbatasan sumber daya.

Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan perhatian pada persepsi guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin, Kampung Cipeundeuy. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dinamika pengalaman guru dalam menghadapi proses akreditasi, termasuk persepsi mereka mengenai manfaat, tantangan, dan dampak akreditasi terhadap kualitas pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi persepsi guru terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-S/M serta memahami bagaimana pengalaman mereka dalam menghadapi mekanisme penilaian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan yang dialami guru, baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan akreditasi, yang sering kali berkaitan dengan beban administrasi, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan pemenuhan standar yang kompleks. Selanjutnya, penelitian ini menilai dampak akreditasi terhadap kualitas pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin, baik dari aspek proses pembelajaran maupun dari segi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai akreditasi pendidikan di Indonesia dengan menambahkan perspektif guru sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan mutu pendidikan. Adapun dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, pengelola sekolah, dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan akreditasi yang lebih adil, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi guru terhadap pelaksanaan akreditasi oleh BAN-S/M di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin, Kampung Cipeundeuy. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada interpretasi makna, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian, bukan pada pengukuran kuantitatif (Creswell & Clark, 2017).

Lokasi penelitian ditetapkan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin karena lembaga ini baru saja menyelesaikan proses akreditasi dan memperoleh peringkat C, sehingga relevan untuk menggali dinamika pengalaman guru. Subjek penelitian

adalah guru yang terlibat langsung dalam persiapan dan pelaksanaan akreditasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap proses akreditasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap aktivitas sekolah, serta analisis dokumen terkait, seperti instrumen akreditasi, laporan penilaian, dan dokumen administrasi sekolah. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan peneliti menggali informasi lebih luas sesuai respons informan. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sekolah dan keterlibatan guru dalam proses akreditasi, sedangkan dokumen dianalisis untuk melengkapi dan memvalidasi data hasil wawancara serta observasi.

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dkk. (2014) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang hingga diperoleh temuan yang konsisten.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi serta dokumen pendukung. Selain itu, dilakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan agar data yang diperoleh sesuai dengan pengalaman mereka. Dengan langkah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin Kp. Cipeundeuy, sebuah madrasah ibtidaiyah yang menjadi pusat pendidikan dasar Islam bagi masyarakat setempat. Sekolah ini terletak di wilayah pedesaan, di mana mayoritas orang tua siswa bekerja sebagai petani, nelayan, atau pedagang kecil. Madrasah ini memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan berbasis agama dan karakter sejak usia dini hingga anak memasuki jenjang sekolah menengah pertama.

Fokus penelitian ini adalah untuk menggali persepsi guru terhadap akreditasi yang dilakukan oleh BAN-S/M, memahami kendala serta dukungan yang mereka alami selama proses akreditasi, dan menilai dampaknya terhadap kualitas

pembelajaran serta minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah ini. Dalam penelitian ini, enam guru dari kelas 1 hingga kelas 6 dan tiga orang tua murid diwawancarai untuk mendapatkan data yang mendalam.

Persepsi guru terhadap akreditasi sangat beragam. Sebagian guru memandang akreditasi sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme mereka. Guru kelas 1, misalnya, menuturkan bahwa proses akreditasi membuatnya lebih disiplin dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Ia merasa RPP, silabus, dan instrumen evaluasi menjadi lebih terstruktur. Guru ini menyatakan: “Dulu saya mengajar kadang seadanya, tetapi sekarang dengan adanya akreditasi, saya harus menyiapkan semuanya dengan rapi. Rasanya seperti diberi panduan untuk selalu lebih baik.”

Guru kelas 4 yang lebih senior menyatakan bahwa akreditasi mendorong mereka untuk reflektif. Ia melihat akreditasi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebagai cermin untuk menilai kualitas diri dan madrasah. Menurutnya, akreditasi menjadi motivasi bagi guru untuk tidak berpuas diri dengan kondisi saat ini, melainkan terus memperbaiki kualitas pembelajaran dan administrasi.

Sementara itu, guru kelas 3 menilai akreditasi membawa tekanan tersendiri. Beban administratif yang harus dipenuhi membuat mereka harus mengalokasikan waktu yang besar untuk menyiapkan dokumen, sehingga waktu untuk merancang kegiatan belajar mengajar menjadi berkurang. Ia mengatakan: “Terkadang saya merasa mengajar menjadi terbatas karena harus mengejar kelengkapan dokumen. Anak-anak tetap belajar, tapi saya tidak bisa memberikan perhatian penuh seperti biasanya.”

Persepsi negatif ini juga muncul dari guru kelas 5 yang menilai beberapa persyaratan akreditasi tidak relevan dengan kondisi sekolah. Misalnya, kriteria mengenai fasilitas laboratorium atau koleksi perpustakaan yang sulit dipenuhi. Guru ini merasa bahwa meskipun sekolah sudah melakukan upaya maksimal, keterbatasan fisik dan dana membuat mereka kurang percaya diri saat asesor melakukan visitasi.

Di sisi lain, beberapa guru melihat akreditasi sebagai sarana untuk meningkatkan citra madrasah di masyarakat. Guru kelas 6 menjelaskan bahwa akreditasi membuat masyarakat lebih percaya untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Ia menambahkan: “Setelah akreditasi selesai, beberapa orang tua datang menanyakan apakah anak mereka bisa diterima di sini. Mereka merasa lebih yakin karena sekolah memiliki pengakuan resmi.”

Selain persepsi guru, penelitian ini juga mengungkap perspektif orang tua. Sebagian orang tua merasa bangga karena anak mereka sekolah di madrasah yang telah terakreditasi. Menurut mereka, akreditasi memberikan jaminan bahwa sekolah sudah memenuhi standar pendidikan yang diakui pemerintah. Salah satu

wali murid mengatakan: “Kami merasa tenang karena sekolah ini memiliki akreditasi. Artinya anak-anak kami tetap mendapatkan pendidikan yang layak meskipun kami tinggal di desa.”

Namun, tidak semua orang tua sepenuhnya yakin bahwa akreditasi berarti kualitas pembelajaran sempurna. Beberapa orang tua masih mengkhawatirkan keterbatasan fasilitas, seperti ruang kelas yang sempit dan kurangnya media belajar. Mereka menyampaikan bahwa akreditasi merupakan langkah awal, tetapi peningkatan sarana-prasarana juga sangat penting agar anak-anak bisa belajar dengan optimal.

Kendala utama yang muncul selama proses akreditasi di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin Kp. Cipeundeuy adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Guru-guru menyebut bahwa ruang kelas sempit, fasilitas perpustakaan minim, dan laboratorium sederhana hampir tidak ada. Guru kelas 2 menuturkan bahwa sekolah harus kreatif memanfaatkan ruang terbatas untuk berbagai kegiatan belajar. Di sisi teknologi, madrasah hanya memiliki satu komputer di ruang guru, sehingga penyusunan dokumen akreditasi harus dilakukan secara bergantian. Hal ini membuat banyak guru harus lembur hingga malam hari untuk menyiapkan dokumen.

Selain kendala fisik, keterbatasan pendampingan juga menjadi masalah. Guru-guru lebih banyak belajar dari pengalaman sekolah lain atau panduan tertulis dari BAN-S/M. Beberapa guru merasa panduan tersebut sulit dipahami dan tidak cukup membantu. Keterbatasan dana juga menjadi kendala. Pengadaan fotokopi dokumen, pencetakan laporan, atau perbaikan kecil ruang kelas seringkali dibebankan pada guru dan orang tua. Guru kelas 5 menyatakan: “Kami harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mencetak dokumen, membeli peralatan tambahan, atau memperbaiki fasilitas kecil. Rasanya berat, tapi tidak ada pilihan lain.”

Meskipun banyak kendala, dukungan dari kepala madrasah dan komite sekolah sangat membantu proses akreditasi. Kepala madrasah selalu memotivasi guru untuk tetap bekerja maksimal dan memastikan mereka memiliki waktu untuk menyiapkan dokumen. Solidaritas antar guru juga menjadi kunci. Guru-guru saling membantu sesuai keahlian masing-masing, ada yang mengetik dokumen, ada yang menyiapkan data siswa, dan ada yang fokus pada administrasi pembelajaran. Partisipasi orang tua juga terlihat jelas, terutama saat kerja bakti memperbaiki sarana sekolah dan menyiapkan lingkungan agar lebih layak untuk penilaian asesor.

Dampak akreditasi terhadap pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin Kp. Cipeundeuy dapat dilihat dari beberapa aspek. Secara positif, guru menjadi lebih disiplin dalam menyusun perangkat pembelajaran, menilai hasil belajar siswa secara sistematis, dan mulai menggunakan metode pengajaran yang lebih kreatif. Misalnya, guru kelas 5 mencoba menggunakan permainan edukatif

sederhana dan media visual untuk menarik minat belajar siswa. Akreditasi juga mendorong guru untuk mengikuti pelatihan tambahan agar kompetensi mereka meningkat.

Namun, dampak negatif juga muncul. Selama periode persiapan akreditasi, guru harus membagi fokus antara dokumen dan kegiatan belajar mengajar. Beberapa guru menyampaikan bahwa mereka merasa pembelajaran menjadi kaku dan kurang fleksibel karena harus sesuai format yang ditetapkan akreditasi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi guru yang ingin mengembangkan metode belajar yang lebih interaktif.

Dari sisi orang tua, akreditasi meningkatkan kepercayaan mereka terhadap madrasah. Banyak orang tua yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih aman menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah yang telah terakreditasi, karena adanya pengakuan resmi dari BAN-S/M. Namun, ada juga orang tua yang tetap menilai secara kritis. Mereka mengamati guru mengajar, fasilitas, dan suasana belajar secara langsung. Beberapa orang tua masih berharap agar madrasah menyediakan sarana tambahan seperti buku bacaan yang lebih banyak dan media pembelajaran yang lebih lengkap.

Secara keseluruhan, akreditasi di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin Kp. Cipeundeuy membawa dampak yang kompleks. Di satu sisi, akreditasi menjadi pendorong perbaikan mutu pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, dan memperkuat citra madrasah di masyarakat. Di sisi lain, akreditasi menimbulkan beban administratif, tekanan psikologis bagi guru, dan menuntut kontribusi tambahan dari orang tua dan masyarakat. Faktor kunci keberhasilan akreditasi di madrasah ini terletak pada solidaritas antar guru, kepemimpinan kepala madrasah, serta dukungan orang tua dan komite sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akreditasi, meskipun bernilai penting, tidak dapat sepenuhnya menjamin mutu pembelajaran tanpa tindak lanjut berkelanjutan. Dukungan jangka panjang dari pemerintah, peningkatan fasilitas, serta pelatihan berkelanjutan bagi guru diperlukan agar akreditasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar formalitas administratif.

Dalam narasi wawancara, setiap guru menyampaikan pengalaman uniknya. Guru kelas 1 merasa termotivasi untuk lebih terstruktur, guru kelas 2 mengalami tekanan administrasi, guru kelas 3 kritis terhadap relevansi standar akreditasi, guru kelas 4 realistis menghadapi keterbatasan fasilitas, guru kelas 5 mencoba inovasi meski terbatas, dan guru kelas 6 melihat akreditasi sebagai cermin evaluatif untuk meningkatkan kualitas sekolah. Orang tua murid memberikan perspektif tambahan, dari kebanggaan hingga kekhawatiran tentang fasilitas yang belum memadai, yang memengaruhi keputusan mereka dalam menyekolahkan anak.

Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan secara utuh pengalaman guru, orang tua, dan madrasah dalam menghadapi akreditasi. Akreditasi berfungsi sebagai dorongan dan refleksi, sekaligus sumber tekanan dan tantangan. Pemahaman mendalam tentang dinamika ini penting untuk merumuskan kebijakan akreditasi yang lebih adil, efektif, dan berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin Kp. Cipeundeuy.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap akreditasi di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin bersifat multidimensional, mencakup persepsi positif dan negatif. Persepsi positif muncul ketika guru melihat akreditasi sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pembelajaran, sedangkan persepsi negatif muncul akibat tekanan administratif, keterbatasan fasilitas, dan beban tambahan yang menyertai proses akreditasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla (2024), yang menyatakan bahwa guru sering mengalami dilema antara memenuhi standar administrasi akreditasi dan menjaga kualitas interaksi belajar mengajar. Guru di madrasah ini merasakan dorongan untuk lebih terstruktur dalam menyusun RPP dan instrumen evaluasi, sejalan dengan pandangan Khotimah, dkk (2021) bahwa akreditasi dapat meningkatkan disiplin dan profesionalisme guru.

Meskipun sebagian guru merasakan manfaat dari akreditasi, beberapa guru menilai proses ini sebagai beban. Hal ini mendukung temuan Dawous dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa akreditasi dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi guru, terutama dalam konteks sekolah dengan sumber daya terbatas. Tekanan ini sering muncul akibat kebutuhan untuk menyusun dokumen administrasi yang kompleks, keterbatasan fasilitas pendukung, dan minimnya pendampingan teknis. Penelitian ini juga memperkuat temuan yang diungkapkan oleh Amri dkk. (2022), yang menyatakan bahwa di sekolah pedesaan, guru sering menghadapi kendala fisik dan finansial dalam memenuhi persyaratan akreditasi.

Dukungan kepala sekolah dan partisipasi orang tua terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan akreditasi. Kepala sekolah berperan sebagai motivator, koordinator, dan fasilitator bagi guru selama proses akreditasi. Dukungan ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional dalam pendidikan, yang menekankan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi, kinerja, dan profesionalisme guru (Leithwood dkk., 2020). Partisipasi orang tua dan komite sekolah juga memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam mempersiapkan sarana-prasarana pendukung akreditasi, yang menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Epstein, 2018).

Dampak akreditasi terhadap kualitas pembelajaran terlihat dari dua sisi.

Secara positif, guru lebih disiplin dalam menyusun perangkat pembelajaran dan mulai mencoba metode pengajaran yang lebih kreatif. Hal ini sejalan dengan temuan Rizki dkk. (2024), yang menyatakan bahwa akreditasi mendorong guru untuk berinovasi dalam metode pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan siswa. Namun, dampak negatif juga terlihat, terutama terkait dengan waktu yang tersita untuk persiapan dokumen dan beban administratif yang mengurangi kualitas interaksi langsung dengan siswa. Hal ini mendukung temuan Mustakimah (2024) bahwa beban administratif akreditasi dapat mengalihkan fokus guru dari proses belajar mengajar yang esensial.

Dari perspektif orang tua, akreditasi meningkatkan kepercayaan mereka terhadap madrasah, yang berdampak pada minat menyekolahkan anak-anak di madrasah tersebut. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Maulana (2022), yang menunjukkan bahwa akreditasi berperan sebagai indikator formal kualitas sekolah di mata masyarakat. Meskipun demikian, orang tua juga menilai bahwa akreditasi tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pembelajaran, karena faktor fasilitas dan suasana belajar tetap menjadi pertimbangan utama dalam memilih sekolah. Hal ini menekankan bahwa akreditasi perlu dilengkapi dengan peningkatan sarana-prasarana dan kualitas guru untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap mutu pendidikan .

Temuan ini juga memberikan kontribusi pada literatur akreditasi pendidikan di Indonesia, terutama dari perspektif guru sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan pendidikan. Guru tidak hanya menjalankan akreditasi sebagai prosedur formal, tetapi juga mengalami refleksi profesional dan tantangan nyata yang mempengaruhi praktik pengajaran sehari-hari. Perspektif ini memperkaya penelitian terdahulu yang cenderung menekankan akreditasi sebagai instrumen evaluasi administratif semata (Irma & Suparto, 2025).

Selain itu, hasil penelitian Ladan Bijani dkk. (2024) menyoroti pentingnya keseimbangan antara tuntutan administratif dan kualitas pembelajaran. Beberapa guru menunjukkan bahwa meskipun akreditasi mendorong keteraturan administrasi, tekanan yang terlalu tinggi dapat menurunkan kualitas pengajaran karena guru harus membagi perhatian antara dokumen dan siswa. Temuan ini mendukung prinsip teori sistem pendidikan, yang menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan integrasi antara kebijakan, sumber daya, dan praktik guru di lapangan (Rodin dkk., 2025). Dengan kata lain, akreditasi harus dirancang tidak hanya sebagai mekanisme evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan profesional guru yang berkelanjutan.

Kendala terkait fasilitas dan sumber daya juga memberikan pelajaran penting bagi pembuat kebijakan. Akreditasi yang menekankan standar fisik dan administrasi tanpa memperhatikan kondisi riil sekolah dapat menjadi beban bagi

guru dan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan temuan Ika Nova Sari & Bambang Sumarsono (2025) yang menekankan bahwa keberhasilan akreditasi sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung, dukungan pemerintah, serta partisipasi aktif pihak sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adil dan kontekstual, yang mempertimbangkan kondisi geografis, ekonomi, dan sumber daya manusia sekolah.

Dukungan kepala sekolah dan kolaborasi antar guru menjadi faktor determinan dalam mengatasi kendala akreditasi. Solidaritas ini sesuai dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa kerja sama tim guru dan kepemimpinan yang efektif dapat mengurangi beban psikologis dan meningkatkan motivasi guru (Misbahul Ulum dkk., 2025). Di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin, kerjasama antar guru terlihat nyata, mulai dari berbagi tugas dalam menyiapkan dokumen hingga membantu guru lain yang kurang mahir dalam administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal sekolah sangat memengaruhi keberhasilan akreditasi.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya refleksi terhadap kebijakan akreditasi nasional. Akreditasi seharusnya tidak hanya menjadi formalitas lima tahunan, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Leithwood dkk. (2020), bahwa kebijakan pendidikan yang efektif adalah kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas profesional guru, memfasilitasi pembelajaran yang bermakna bagi siswa, dan melibatkan masyarakat dalam mendukung pendidikan.

Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa akreditasi memiliki efek ganda bagi guru, siswa, dan masyarakat. Dari satu sisi, akreditasi mendorong perbaikan kualitas, meningkatkan disiplin administrasi, dan memperkuat citra madrasah. Dari sisi lain, tekanan administratif, keterbatasan sarana, dan kurangnya dukungan teknis dapat menimbulkan stres bagi guru dan mengurangi fokus pada pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam pelaksanaan akreditasi, yang mempertimbangkan kondisi nyata sekolah, kapasitas guru, dan dukungan masyarakat.

Temuan ini juga memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pengelola sekolah. Pertama, perlu adanya program pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi administrasi dan pedagogik. Kedua, dukungan fisik dan finansial dari pemerintah atau pihak terkait harus diperkuat agar sekolah di pedesaan mampu memenuhi standar akreditasi tanpa membebani guru dan orang tua. Ketiga, partisipasi masyarakat, termasuk orang tua dan komite sekolah, perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Dengan mengaitkan hasil penelitian dengan literatur terdahulu, dapat disimpulkan bahwa akreditasi tidak sekadar merupakan instrumen evaluasi formal yang menilai kesesuaian sekolah terhadap standar yang ditetapkan oleh BAN-S/M, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penting untuk pengembangan profesional guru, sarana refleksi terhadap kualitas pendidikan, dan media untuk membangun serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Penelitian ini menunjukkan bahwa guru memandang akreditasi sebagai dorongan untuk menyusun perangkat pembelajaran dengan lebih terstruktur, menata administrasi sekolah secara rapi, dan meningkatkan profesionalisme dalam proses belajar mengajar. Sejalan dengan temuan, akreditasi mendorong guru untuk mengadopsi metode pembelajaran yang lebih kreatif dan terukur, sekaligus menjadi alat refleksi bagi guru dan sekolah untuk menilai kekuatan dan kelemahan mereka secara objektif.

Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa akreditasi dapat menimbulkan tekanan administratif, terutama di sekolah dengan keterbatasan sumber daya. Guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin Kp. Cipeundeuy mengalami beban tambahan dalam menyiapkan dokumen, melaporkan data, dan menyesuaikan proses pembelajaran dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan dilema antara memenuhi tuntutan akreditasi dan menjaga kualitas interaksi belajar mengajar. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan administratif dapat menurunkan fokus guru pada pembelajaran yang esensial.

Keberhasilan akreditasi terbukti sangat bergantung pada kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kepemimpinan kepala sekolah, kolaborasi antar guru, dan kapasitas administrasi yang dimiliki guru. Kepala sekolah yang efektif berperan sebagai motivator dan fasilitator, mendorong guru untuk tetap produktif meski menghadapi keterbatasan, sedangkan kolaborasi antar guru memudahkan pembagian tugas administratif dan pertukaran pengetahuan. Solidaritas guru, dukungan orang tua, dan peran aktif komite sekolah menjadi faktor penunjang penting dalam memastikan pelaksanaan akreditasi berjalan lancar. Faktor eksternal meliputi dukungan pemerintah, kebijakan yang kontekstual, serta ketersediaan fasilitas dan sumber daya pendukung. Kombinasi faktor internal dan eksternal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional dan teori sistem pendidikan, yang menekankan pentingnya interaksi harmonis antara kebijakan, sumber daya, dan praktik profesional di lapangan.

Pendekatan yang mempertimbangkan kedua dimensi ini—internal dan eksternal—akan menghasilkan akreditasi yang lebih adil, efektif, dan berdampak nyata. Akreditasi yang dirancang dengan konteks sekolah, kondisi geografis, kapasitas guru, dan dukungan masyarakat akan menjadi instrumen yang tidak

hanya menilai formalitas, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, akreditasi berfungsi ganda: sebagai alat evaluasi sekaligus sebagai sarana pengembangan kapasitas sekolah dan guru, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diberikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa akreditasi di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin Kp. Cipeundeuy memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, membangun profesionalisme guru, dan memperkuat citra sekolah di masyarakat. Agar dampaknya optimal, akreditasi harus diimbangi dengan dukungan fasilitas, pelatihan berkelanjutan bagi guru, kebijakan yang adil, dan partisipasi aktif orang tua serta masyarakat. Pendekatan holistik semacam ini akan menghasilkan akreditasi yang tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga instrumen yang benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh..

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap akreditasi di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muhtadin bersifat kompleks dan multidimensional. Guru memandang akreditasi bukan sekadar proses administratif, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan mutu pembelajaran dan profesionalisme. Namun, akreditasi masih menghadirkan tekanan administratif dan beban psikologis yang berpotensi mengurangi fokus guru pada inovasi pembelajaran. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas akreditasi sangat bergantung pada keseimbangan antara tuntutan administratif dan peningkatan kualitas pembelajaran. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa akreditasi harus dipahami dalam kerangka manajemen mutu berbasis sekolah yang kontekstual, bukan semata-mata kepatuhan terhadap standar formal. Secara praktis, hasil penelitian ini menuntut kebijakan akreditasi yang lebih adaptif terhadap kondisi sekolah, dengan memperkuat dukungan sarana, pelatihan administrasi, dan pengembangan profesional guru. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika persepsi guru terhadap akreditasi sebagai faktor penting dalam budaya mutu pendidikan. Prospek penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengembangan model akreditasi berbasis partisipasi guru dan masyarakat yang menekankan aspek pembelajaran, bukan hanya kelengkapan dokumen, sehingga akreditasi benar-benar menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K., Riyantini, S., Hasri, S., & Sohiron, S. (2022). Strategi Pengembangan Mutu dan Akreditasi Di Madrasah Dalam Menghadapi Revolusi 5.0. *Jurnal Sustainable*, 5(2), 172–182. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i2.2509>
- Asopwan, D. (2019). Studi tentang akreditasi dalam meningkatkan produktivitas sekolah. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(2), 265–272.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- Darathea, M. (2025). *Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelas Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Intan Rokan Hulu* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/87692/>
- Dawous, G. G., Satori, D., Munir, M., & Suharto, N. (2024). Hotspot Stres Pada Guru Sekolah Dasar: Analisis Faktor-Faktor Pemicu dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Pendidikan. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 7(4), 588–606.
- Dewi, P. R., & Ali, N. (2020). Peningkatan skor akreditasi madrasah melalui lembaga penjaminan mutu. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 5(1), 44–54.
- Epstein, J. (2018). *School, family, and community partnerships, student economy edition: Preparing educators and improving schools*. Routledge.
- Hakim, L. (2024). *Guru Profesional: Konsep, Strategi, dan Tantangan dalam Menghadapi Era Modern*. Penerbit Adab.
- Hendrik Dewantara, S. E. (2024). *Membangun masa depan pendidikan: Inovasi dan tantangan dalam sertifikasi guru di Indonesia*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Ika Nova Sari, & Bambang Sumarsono, R. (2025). Kepemimpinan dan Kolaborasi Stakeholder untuk Akreditasi A Pada PAUD di Desa Sukopuro. *Jurnal Pelita PAUD*, 9(2), 463–470. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v9i2.4694>
- Irma, D. & Suparto. (2025). Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi: Kajian Kebijakan di Indonesia. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 513–520. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1264>
- Isnaini, M. (2013). INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DI MADRASAH. *Al-Ta lim Journal*, 20(3), 445–450. <https://doi.org/10.15548/jt.v20i3.41>
- Jannah, R., & Khairunnisa, K. (2025). Evaluasi Kesiapan Madrasah Ibtidaiyah di Banjarmasin Timur Terhadap Akreditasi Nasional. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 156–182. <https://doi.org/10.58577/dimar.v6i2.334>
- Khotimah, H., Harapan, E., & Kesumawati, N. (2021). Kualitas Guru Mengajar Sebagai Salah Satu Upaya Meningkatkan Status Akreditasi Sekolah. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 6(1), 124–131. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v6i1.4102>
- Ladan Bijani, H., Nurliana Siregar, E., Mutia, Z., & Rizqa, M. (2024). Urgensi Administrasi Pendidikan Bagi Peningkatan Mutu Pendidikan. *PANDU : Jurnal*

- Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum*, 2(2), 28–42.
<https://doi.org/10.59966/pandu.v2i2.925>
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School leadership & management*, 40(1), 5–22.
<https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077>
- Maulana, M. I. (2022). Peran sistem akreditasi dalam meningkatkan produktivitas di lembaga pendidikan. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v2i1.15867>
- Miles, M. B., Huberman, & A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Misbahul Ulum, Dina Salsabila, Sabila Sherinata Mayandari, Muhammad Farhan Firdaus, Muhammad Yusrizal Lifanto, & Mu'alimin Mu'alimin. (2025). Peran Psikologi Manajemen dalam Optimalisasi Motivasi Guru sebagai Strategi Peningkatan Efektivitas Sekolah. *Edukasi Elita : Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(3), 243–253. <https://doi.org/10.62383/edukasi.v2i3.1730>
- Mustakimah, M. (2024). *Dampak Akreditasi Lembaga Terhadap Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Banyumas*. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia).
- Rahman, W., & Asha, L. (2024). The Analysis of the Comparison of the Education System in Indonesia: Perspectives on Gaps and Innovation. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 3(5), 2009–2016.
<https://doi.org/10.61445/tofedu.v3i5.340>
- Ramdani, A., Witono, A. H., & Sukardi, S. (2018). Pelatihan Pengisian Instrumen Akreditasi Untuk Peningkatan Mutu Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah Pada Kelompok Kerja Madrasah Aliyah Wilayah IV. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 1(1). <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v1i1.211>
- Rizki, N. J., Qomariyah, S., & Neneng, N. (2024). Peran akreditasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Adzkia 1 Sukabumi. *KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(3), 137–152.
<https://doi.org/10.47861/khirani.v2i3.1277>
- Rodin, R., Endang, E., Yanto, M., Istan, M., & Azwar, B. (2025). Penerapan Sistem Pendidikan Islam: Kajian tentang Strategi, Sumber Daya, dan Mutu. *An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies*, 1(1), 47–79.
<https://doi.org/10.58788/jeis.v1i1.8>
- Salsabilla, I. S., Niswah, S., & Jaya, A. I. A. (2024). Persepsi Guru dan Siswa terhadap Manajemen Akreditasi di Sekolah Menengah Atas. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 10(2), 227–246.
<https://doi.org/10.26594/dirasat.v10i2.5332>
- Sari, N. E., & Saputra, A. A. (2024). Management of Facilities and Infrastructure at MTS Negeri 2 Palembang: Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di MTS Negeri 2 Palembang. *TIME: Transformation in Islamic Management and Education Journal*, 1(1), 52–60.
- Sulistiyanto, E., Masrokan, P., & Muhajir, A. (2023). Paradigma Baru Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Indonesia. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(2), 263–286.

<https://doi.org/10.24256/kelola.v8i2.3927>

YADNYA, D. I. G. A. O., & PD, M. (2020). *Kiat Sukses Menyiapkan Akreditasi Sekolah*. SPASI MEDIA.

Yunadi, Y. Y. (2025). *Madrasah Minimalis Strategi Baru Mengembangkan Sekolah Unggul Berbasis Islam*. Deepublish.

Zahwa, A., Safitri, R. D., Pratiwi, A. N. R., & Subiakto, V. S. N. (2025). Meningkatkan daya saing bangsa: Peran strategis investasi pendidikan dalam pengembangan SDM. *Indonesian Journal Of Education*, 2(1), 150–155. <https://doi.org/10.71417/ije.v2i1.392>

Zain, A. (2022). *Manajemen pendidikan: Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan akreditasi*. Penerbit Insania.